

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.
20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN
KEDOKTERAN

AKD: RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU
NO. 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN
KEDOKTERAN

Bulan: Juli 2020

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan globalisasi perlu dilakukan pembaruan Pendidikan Kedokteran secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab, memiliki etika dan moral dengan memadukan pendekatan humanistik terhadap pasien, dan berjiwa sosial tinggi.

Oleh karenanya diperlukan rencana strategis dan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang meliputi pembentukan, penyelenggaraan, dan pengembangan program studi kedokteran atau program studi kedokteran gigi, pengaturan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran, Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, sumber daya manusia, Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, Kurikulum, Mahasiwa, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, uji kompetensi, kerjasama Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran, penelitian, dan penjaminan mutu yang diselenggarakan secara komprehensif. Dalam praktiknya, berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

Dasar Hukum:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 UUD RI Tahun 1945.

Dalam UU ini diatur tentang:

Asas penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang mengedepankan kebenaran ilmiah, tanggung jawab, manfaat, kemanusiaan, keseimbangan, kesetaraan, relevansi, afirmasi, dan etika profesi dengan tujuan untuk menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. Untuk itu, kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi adalah kurikulum berbasis kompetensi dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis.

Catatan:

UU No 20 tahun 2013 UUD RI 1945 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Agustus 2013.

Peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.

RS Pendidikan yang sudah ada sebelum UU ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan UU ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU ini diundangkan.

UU ini terdiri dari 8 Bab dan 64 Pasal, Penjelasan 18 halaman.

Sumber Kutipan: http://dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2013_20.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	14 Butir Aspirasi Revisi UU Pendidikan Kedokteran (1)	https://www.liputan6.com/health/read/3421959/14-butir-aspirasi-revisi-uu-pendidikan-kedokteran-1
Berita	14 Butir Aspirasi Revisi UU Pendidikan Kedokteran (2)	https://www.liputan6.com/health/read/3422015/14-butir-aspirasi-revisi-uu-pendidikan-kedokteran-2
Berita	Baleg Setujui Revisi UU Pendidikan Kedokteran	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13657
Berita	Baleg Setujui Harmonisasi RUU Pendidikan Kedokteran	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28717/t/Baleg+Setujui+Harmonisasi+RUU+Pendidikan+Kedokteran
Berita	DPR Kejar Pembahasan Revisi UU Pendidikan Kedokteran	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24391
Berita	DPR Setujui RUU Pendidikan Kedokteran	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/6391
Berita	Karut Marut Sistem Pendidikan Kedokteran Indonesia	https://tirto.id/karut-marut-sistem-pendidikan-kedokteran-indonesia-cNit
Berita	Komisi X DPR dan Pemerintah Sepakat Perpanjang Pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/5239
Berita	Komisi X DPR Desak Pemerintah Terbitkan PP Pelaksanaan Pendidikan Kedokteran	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/15390
Berita	Komisi X DPR Minta Masukan Akademisi Jatim Terkait RUU Pendidikan Kedokteran	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3734
Berita	Legislator Apresiasi Baleg Setujui Harmonisasi RUU Pendidikan Kedokteran	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28753
Berita	Pendidikan Kedokteran Perlu Dipayungi UU	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/6023
Berita	RUU Pendidikan Kedokteran Akan Beri Perhatian pada Standarisasi Kompetensi	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/21364
Berita	RUU Pendidikan Kedokteran akan Efektifkan Jenjang Pendidikan Dokter	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/21367/t/RUU+Pendidikan+Kedokteran+akan+Efektifkan+Jenjang+Pendidikan+Dokter
Berita	RUU Pendidikan Kedokteran Momentum Perbaiki Pelayanan Kesehatan	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3513
Berita	RUU Pendidikan Kedokteran Syaratkan Lulus Psikometri	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3750
Berita	UU Pendidikan Kedokteran Angin Segar Untuk Siswa Cerdas Kurang Mampu	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3748
Jurnal	Keberadaan Dokter Layanan Primer: Telaah terhadap Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	http://berkas.dpr.go.id/pusatp/nuu/jurnal-prodigy/public-file/jurnal-prodigy-public-1.pdf
Undang-undang & Peraturan	Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi	https://jdih.ristekbrin.go.id/view-file/?id=19d9ee67-5fa2-47nf5-8242-8c3ad7317361
Undang-undang & Peraturan	Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20200226-071928-3689/n.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi	https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/permen_tahun2014_nomor030/n.pdf

Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	https://jdih.kemdikbud.go.id/?\nservice=srv:04.8jdih&ref=12xc4\nce17e42iv77cea1f738142tabkdrd8\n437b5081c409926629w73ea696z4bp\n619e303160ca6la10c0c16gf6c77uo\n31af2dh9y08e93ee945jm76634d9c3\nqsf2dab&task=136
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran	https://jdih.ristekbrin.go.id/\nview-file/?id=de304a88-6cd5-47\n6b-af90-59e6cd3d5067
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri	https://luk.staff.ugm.ac.id/at\nur/Permenristekdikti2-2015Pene\nrimaanMahasiswaBaru.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi	http://www.polsri.ac.id/files/\n2018/02/PERMEN-NOMOR-2-TAHUN-2\n016-TENTANG-PERUBAHAN-PERMEN-N\nOMOR-26-TAHUN-2015.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi	https://jdih.ristekbrin.go.id/\nview-file/?id=d5a57fec-c629-42\n26-a7fa-f12f83bb4b5f
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	http://sipma.ui.ac.id/files/do\nkumen/U_SPMI_DIKTI/PERATURAN%2\n0PERMENRISTEKDIKTI%20NOMOR%206\n2%20TAHUN%202016%20TENTANG%20S\nPM%20PT.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi	http://ldikti3.ristekdikti.go\n.id/v2/wp-content/uploads/Perm\nenristekdikti-Nomor-26-Tahun-2\n015-tentang-Registrasi-Pendidi\nk-Pada-Perguruan-Tinggi.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nnme/Details/64760
Undang-undang & Peraturan	Rekam jejak RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	http://dpr.go.id/uu/detail/id/\n330
Undang-undang & Peraturan	RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	http://www.dpr.go.id/dokakd/do\nkumen/RJ2-20200226-071928-7172\n.pdf
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	http://dpr.go.id/dokjdih/docum\nent/uu/UU_2013_20.pdf
Surat kabar	DPR Desak Aturan Dokter Layanan Primer - Komunikasi di Internal Profesi Dokter Perlu lebih Intensif	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/27092
Surat kabar	DPR Menyoal Program DLP : Pemerintah Menyiapkan 17 Fakultas Kedokteran	http://epaper.dpr.go.id/index/\ndetail/id/3301
Surat kabar	Moratorium Pendidikan Kedokteran	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/30430
Surat kabar	UU Pendidikan Dokter Perlu Harmonisasi	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/37216